

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Hasil Belajar

Menurut Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 104 tahun 2014 pasal 1, Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik adalah proses pengumpulan informasi/bukti tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis, selama dan setelah proses pembelajaran

Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Pasal 3 menyebutkan :

- a. Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik berfungsi untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
- b. Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memenuhi fungsi formatif dan sumatif dalam penilaian.
- c. Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik memiliki tujuan untuk:
 - 1) Mengetahui tingkat penguasaan kompetensi.
 - 2) Menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi.
 - 3) Menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan

tingkat penguasaan kompetensi dan

4) Memperbaiki proses pembelajaran.

Hasil belajar Peserta Didik bagi kebanyakan orang berarti ulangan, ujian atau tes. Maksud ulangan tersebut ialah untuk memperoleh suatu indeks dalam menentukan keberhasilan Peserta Didik.

Nana Sudjana (2000:7) merupakan suatu kompetensi atau kecakapan yang dapat dicapai oleh Peserta Didik setelah melalui kegiatan pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan oleh guru di suatu sekolah dan kelas tertentu.

Menurut Herman Hudojo dalam bukunya Jihad dan Haris (2012:3)

“belajar merupakan kegiatan bagi setiap orang pengetahuan, ketrampilan, kegemaran dan sikap seseorang terbentuk, dimodifikasi dan berkembang disebabkan belajar. Karena itu orang dikatakan belajar, bila dapat diasumsikan dalam diri orang itu menjadi suatu peruses kegiatan yang mengakibatkan suatu perubahan tingkah laku”.

Menurut Nana Sudjana yang dikutip oleh Rochmad Wahab (2009 : 24) membagi lima kategori hasil belajar yaitu: informasi verbal, keterampilan intelektual, kognitif, sikap, dan motorik. Tipe hasil belajar terdiri dari :ranah kognitif, afektif dan psikomotor.

Dari definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hasil belajar adalah prestasi belajar yang dicapai Peserta Didik dalam proses kegiatan belajar mengajar dengan membawa suatu perubahan dan pembentukan tingkah laku seseorang. Untuk menyatakan bahwa suatu proses belajar dapat dikatakan berhasil, setiap guru memiliki pandangan

masing-masing sejalan dengan filsafatnya. Namun untuk menyamakan persepsi sebaiknya kita berpedoman pada kurikulum yang berlaku saat ini yang telah disempurnakan, antara lain bahwa suatu proses belajar mengajar tentang suatu bahan pembelajaran dinyatakan berhasil apabila tujuan pembelajaran khususnya dapat dicapai.

2. Faktor faktor yang mempengaruhi prestasi belajar (hasil belajar)

yaitu:

a. Faktor bahan atau hal yang dipelajari

Bahan atau hal yang dipelajari ikut menentukan bagaimana proses pembelajaran dapat berlangsung, dan bagaimana hasilnya agar dapat sesuai dengan yang diharapkan (Sudjana, 2013:12).

b. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan terdiri dari :

1) Lingkungan alami

Yang dimaksud dengan lingkungan alami adalah keadaan lingkungan disekitar Peserta Didik yang dapat mempengaruhi hasil belajar, seperti temperatur udara dan kelembaban. Belajar dengan udara yang segar akan lebih baik hasilnya daripada belajar dalam kondisi pengab dan udara panas.

2) Lingkungan sosial

Lingkungan sosial yang baik yang berwujud manusia maupun hal hal lain akan berpengaruh langsung dalam proses dan hasil belajar Peserta Didik. Peserta Didik yang sedang belajar memecahkan persoalan dan dibutuhkan ketenangan, dengan kehadiran orang lain

yang selalu mondar mandir didekatnya maka Peserta Didik tersebut akan terganggu(Sudjana, 2013:12).

3) Faktor instrumental

Faktor instrumental adalah faktor yang ada dan pemanfaatannya telah dirancang sesuai dengan hasil belajar yang diharapkan. Faktor ini dapat berfungsi sebagai sarana untuk tercapainya tujuan pembelajaran yang telah dirancang, faktor ini dapat berupa :

- a) Hardware (perangkat keras) seperti gedung, perlengkapan belajar, alat praktikum.
- b) Software (perangkat lunak), perangkat ini berupa kurikulum, program, peraturan dan pedoman pembelajaran(Sudjana, 2013:12).

4) Faktor kondisi individu Peserta Didik

Faktor kondisi individu Peserta Didik mencakup dua hal yaitu :

1) Kondisi Fisiologis

Kondisi fisiologis sangat berpengaruh terhadap kegiatan pembelajaran seorang Peserta Didik. Seorang Peserta Didik yang dalam kondisi bugar jasmaninya akan berlainan dengan belajarnya Peserta Didik yang dalam keadaan kelelahan. Disamping kondisi fisiologis umum, hal yang tidak kalah penting adalah kondisi panca indra, terutama penglihatan dan pendengaran (Sudjana, 2013:12).

3) Kondisi Psikologis

Kondisi psikologis yang mempengaruhi proses dan hasil belajar antara lain minat, bakat, kecerdasan, motivasi dan kemampuan kognitif (Sudjana, 2013:12).

3. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

a. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Menurut Buku Guru PPKn (2014:1) mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran penyempurnaan dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang semula dikenal dalam Kurikulum 2006. Penyempurnaan tersebut dilakukan atas dasar pertimbangan: (1) Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa diperankan dan dimaknai sebagai entitas inti yang menjadi sumber rujukan dan kriteria keberhasilan pencapaian tingkat kompetensi dan pengorganisasian dari keseluruhan ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; (2) substansi dan jiwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia ditempatkan sebagai bagian integral dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yang menjadi wahana psikologis-pedagogis pembangunan warganegara Indonesia yang berkarakter Pancasila.

Perubahan tersebut didasarkan pada sejumlah masukan penyempurnaan pembelajaran PKn menjadi PPKn yang mengemuka dalam lima tahun terakhir, antara lain: (1) secara substansial, PKn terkesan lebih dominan bermuatan ketatanegaraan sehingga muatan nilai dan moral Pancasila kurang mendapat aksentuasi yang proporsional; (2) secara metodologis, ada kecenderungan pembelajaran yang mengutamakan pengembangan ranah sikap (afektif), ranah pengetahuan (kognitif), pengembangan ranah keterampilan (psikomotorik) belum dikembangkan secara optimal dan utuh (koheren).

Selain itu, melalui penyempurnaan PKn menjadi PPKn tersebut terkandung gagasan dan harapan untuk menjadikan PPKn sebagai salah satu mata pelajaran yang mampu memberikan kontribusi dalam solusi atas berbagai krisis yang melanda Indonesia, terutama krisis multidimensional. PPKn sebagai mata pelajaran yang memiliki misi mengembangkan keadaban Pancasila, diharapkan mampu membudayakan dan memberdayakan peserta didik agar menjadi warga Negara yang cerdas dan baik serta menjadi pemimpin bangsa dan negara Indonesia di masa depan yang amanah, jujur, cerdas, dan bertanggungjawab.

Bertolak dari berbagai kajian secara filosofis, sosiologis, yuridis, dan paedagogis, mata pelajaran PPKn dalam Kurikulum 2013, secara utuh memiliki karakteristik sebagai berikut :

- 1) Nama mata pelajaran yang semula Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) telah diubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn);
- 2) Mata pelajaran PPKn berfungsi sebagai mata pelajaran yang memiliki misi pengokohan kebangsaan dan penggerak pendidikan karakter;
- 3) Kompetensi Dasar (KD) PPKn dalam bingkai kompetensi inti (KI) yang secara psikologis-pedagogis menjadi pengintegrasikan kompetensi peserta didik secara utuh dan koheren dengan penanaman, pengembangan, dan/atau penguatan nilai dan moral Pancasila; nilai dan norma UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika; serta wawasan dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4) Pendekatan pembelajaran berbasis proses keilmuan (scientific approach) yang dipersyaratkan dalam kurikulum 2013 memusatkan perhatian pada peserta didik untuk lebih aktif.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu program pendidikan yang berusaha menggabungkan unsur – unsur substantik dari komponen civic education melalui model pembelajaran yang demokratis, interaktif, serta humanis dalam lingkungan yang demokratis.

b. Tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Sesuai dengan PP Nomor 32 Tahun 2013 penjelasan pasal 77 J ayat (1) huruf d ditegaskan bahwa Pendidikan kewarganegaraan

dimaksudkan untuk membentuk Peserta Didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, kesadaran berkonstitusi Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara umum tujuan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah mengembangkan potensi peserta didik dalam seluruh dimensi kewarganegaraan, yakni: (1) sikap kewarganegaraan termasuk keteguhan, komitmen dan tanggung jawab kewarganegaraan (*civic confidence, civic commitment, and civic responsibility*); (2) pengetahuan kewarganegaraan; (3) keterampilan kewarganegaraan termasuk kecakapan dan partisipasi kewarganegaraan (*civic competence and civic responsibility*).

★ Secara khusus Tujuan PPKn yang berisikan keseluruhan dimensi tersebut sehingga peserta didik mampu:

- 1) Menampilkan karakter yang mencerminkan penghayatan, pemahaman, dan pengamalan nilai dan moral Pancasila secara personal dan sosial.
- 2) Memiliki komitmen konstitusional yang ditopang oleh sikap positif dan pemahaman utuh tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif serta memiliki semangat kebangsaan serta cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-

nilai Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan

- 4) Berpartisipasi secara aktif, cerdas, dan bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat, tunas bangsa, dan warga negara sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang hidup bersama dalam berbagai tatanan sosial Budaya.

c. Fungsi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan

Dalam Permendiknas No. 22 tahun 2006, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berfungsi sebagai wahana untuk membentuk warga Negara yang cerdas, terampil dan berkarakter yang setia pada bangsa Indonesia dalam kebiasaan berfikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945.

★ Menurut Somantri (2001) dalam (<http://literatur.blogspot.com>) memberikan pemaparan mengenai fungsi PPKn sebagai berikut :

Usaha sabar yang dilakukan secara ilmiah dan psikologis untuk memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik agar menjadi internalisasi moral Pancasila dan pengetahuan Kewarganegaraan untuk melandasi tujuan nasional yang diwujudkan dalam intergritas pribadi dan perilaku sehari – hari.

Berdasarkan pada fungsi di atas Pendidikan Kewarganegaraan harus dinamis dan mampu menarik perhatian Peserta Didik yaitu

dengan cara guru membantu mengembangkan pemahaman baik materi maupun ketrampilan intelektual dan partisipasi yang menghasilkan pemahaman tentang arti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Dari pendapat tersebut dapat di simpulkan bahwa norma hidup bermasyarakat adalah norma yang mengatur kehidupan bermasyarakat yang berupa suatu perintah yang harus di taatidan larangan yang harus dihindari. Macam norma diantaranya norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma hukum.

d. Ruang Lingkup Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Menurut Permendikbud No 58 Tahun 2014 Dengan perubahan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), maka ruang lingkup PPKn meliputi:

- 1) Pancasila, sebagai dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup bangsa.
- 2) UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 3) Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai kesepakatan final bentuk Negara Republik Indonesia.
- 4) Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud filosofi kesatuan yang melandasi dan mewarnai keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dengan demikian PPKn lebih memiliki kedudukan dan fungsi sebagai berikut:

- 1) PPKn merupakan pendidikan nilai, moral/karakter, dan kewarganegaraan khas Indonesia yang tidak sama sebangun dengan civic education di USA, citizenship education di UK, talimatul muwatanah di negara-negara Timur Tengah, education civicas di Amerika Latin.
- 2) PPKn sebagai wahana pendidikan nilai, moral/karakter Pancasila dan pengembangan kapasitas psikososial kewarganegaraan Indonesia sangat koheren (runut dan terpadu) dengan komitmen pengembangan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dan perwujudan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 selanjutnya apabila kita bandingkan dengan Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan menurut Permendiknas No. 22 tahun 2006 sebagai yakni berikut :
 - a) Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, sumpah pemuda, keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia, sumpah pemuda, pengamalan nilai nilai pancasila dalam kehidupan sehari hari, pancasila sebagai ideologi terbuka.
 - b) Norma, hukum dan peraturan meliputi tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlakudimasyarakat, peraturan daerah, norma dalam

kehidupan baerbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional.

- c) Hak asasi manusia meliputi hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrument nasional dan internasional HAM, pemajuan, penghormatan, dan perlindungan HAM.
- d) Kebutuhan warga Negara meliputi hidup gotong royong, harga diri setiap warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengemukakan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga Negara.
- e) Konstitusi Negara meliputi proklamasi kemerdekaan dan konstitusi pertama, konstitusi konstitusi Yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar Negara dengan konstitusi.
- f) Kekuasaan dan politik, meliputi Pemerintahan desa, Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintah pusat, demokrasi dan system politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem Pemerintahan pers dalam masyarakat demokrasi.
- g) Pancasila meliputi kedudukan pancasila sebagai dasar Negara dan idiologi Negara, proses perumusan pancasila sebagai dasar Negara, pengamalan nilai pancasila dalam kehidupan sehari hari, pancasila sebagai ideologi Negara.
- h) Globalisasi meliputi globalisasi lingkungan, politik luar negeri

Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional dan mengevaluasi globalisasi.

Uraian diatas menegaskan bahwa materi PKn dapat diperoleh dari berbagai sumber yang memiliki kualifikasi untuk dijadikan ajar yang tidak menyimpang dari kurikulum yang telah ditentukan. Menurut Depdiknas (2007: 2) aspek – aspek kompetensi dalam pendidikan kewarganegaraan adalah :

a. Pengetahuan Pancasila dan Kewarganegaraan (*Civic Knowledge*)

Menyangkut kemampuan akademik keilmuan yang dikembangkan dari berbagai teori atau konsep politik, hukum dan moral. Dengan demikian, mata pelajaran PKn merupakan bidang kajian multi disipliner. secara terperinci, materi pengetahuan kewarganegaraan meliputi pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab warga Negara, hak asasi manusia, prinsip – prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintah dan non pemerintah, identitas nasional, pemerintah berdasar hukum dan peradilan yang bebas dan tidak memihak, konstitusi serta nilai – nilai dan moral dalam masyarakat

b. Keterampilan Kewarganegaraan (*Civic Skills*)

Meliputi keterampilan intelektual (*intellectual skills*) dan keterampilan berpartisipasi (*participatory skills*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. contoh ketrampilan intelektual adalah

kecakapan dalam merespon berbagai persoalan politik, misalnya merancang dialog dengan DPR contohnya keterampilan berpartisipasi menggunakan keahliannya menggunakan hak dan kewajibannya dibidang hukum, misalnya melaporkan kepada polisi atas tindak kejahatan yang diketahui.

c. Watak Kepribadian Kewarganegaraan (*civic disposition*)

Watak kepribadian kewarganegaraan sesungguhnya merupakan dimensi yang paling substansif dan esensial dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dimensi watak atau karakter kewarganegaraan dapat dipandang sebagai muara dari pengembangan kedua dimensi sebelumnya dengan memperhatikan visi, misi dan tujuan pelajaran ini ditandai dengan penekanan dengan dimensi watak, karakter, sikap dan potensi lain yang bersifat afektif.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, seorang warga Negara perlu memiliki pengetahuan yang baik, terutama pengetahuan di bidang politik, hukum dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya pengetahuan dan keahliannya itu akan membentuk suatu watak, karakter, sikap atau kebiasaan sehari – hari yang mencerminkan warga Negara yang baik.

4. Metode Pembelajaran kooperatif *Jigsaw*

a. Pengertian Pembelajaran kooperatif *jigsaw*

Dari sisi etimologi *Jigsaw* berasal dari bahasa inggris yaitu gergaji ukir dan ada juga yang menyebutnya dengan istilah Fuzzle, yaitu sebuah teka teki yang menyusun potongan gambar

(Slavin,2008:236). Pembelajaran kooperatif metode *jigsaw* ini juga mengambil pola cara bekerja sebuah gergaji (*jigsaw*), yaitu siswa melakukan sesuatu kegiatan belajar dengan cara bekerja sama dengan siswa lain untuk mencapai tujuan bersama.

Model pembelajaran kooperatif model *jigsaw* adalah sebuah model belajar kooperatif yang menitik beratkan kepada kerja kelompok siswa dalam bentuk kelompok kecil, seperti yang diungkapkan, bahwa pembelajaran kooperatif teknik *jigsaw* ini merupakan model belajar kooperatif dengan cara siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri atas empat sampai dengan enam orang secara heterogen dan siswa bekerja sama saling ketergantungan positif dan bertanggung jawab secara mandiri.

Dalam metode pembelajaran *jigsaw* ini siswa memiliki banyak kesempatan untuk mengemukakan pendapat, dan mengelolah informasi yang didapat dan dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasi, anggota kelompok bertanggung jawab atas keberhasilan kelompoknya dan ketuntasan bagian materi yang dipelajari, dan dapat menyampaikan kepada Tujuan Pembelajaran Pembelajaran kooperatif *jigsaw*.

Dalam belajar kooperatif *jigsaw* meskipun mencakup beragam tujuan sosial, juga memperbaiki prestasi siswa atau tugas – tugas akademis penting lainnya. Beberapa ahli berpendapat bahwa model ini unggul dalam membantu peserta didik memahami konsep - konsep sulit. Para pengembang model ini telah

menunjukkan bahwa model struktur penghargaan kooperatif telah dapat meningkatkan nilai siswa pada belajar akademik dan perubahan norma yang berhubungan dengan hasil belajar. Disamping mengubah norma yang berhubungan dengan hasil belajar, pembelajaran kooperatif dapat memberi keuntungan baik pada peserta didik kelompok bawah maupun kelompok atas yang bekerja bersama menyelesaikan tugas – tugas akademik.

b. Manfaat Pembelajaran Metode Pembelajaran Kooperatif *Jigsaw*

Terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari metode pembelajaran kooperatif teknik *jigsaw* diantaranya ada unsur permainan yang menyebabkan metode ini lebih menarik perhatian murid. Sementara menurut Arends dalam (Slavin 2008:251) dalam model pembelajaran Kooperatif *Jigsaw* terdapat beberapa manfaat yaitu:

- 1) Dapat meningkatkan kerjasama antar peserta didik.
- 2) Dapat menumbuhkan kembangkan potensi intelektual sosial, dan emosional yang ada di dalam diri peserta didik.
- 3) Dapat melatih peserta mengemukakan gagasan dan perasaan secara cerdas dan kreatif.
- 4) Dapat membuat peserta didik menjadi berpikir kritis dan diharapkan mampu menghargai pendapat dari peserta didik lainnya.

Metode pembelajaran kooperatif teknik *jigsaw* yang dilaksanakan dalam bimbingan kelompok dapat meningkatkan kepercayaan diri murid dalam menyampaikan pendapatnya, saling bertukar pikiran, mampu menghargai pendapat peserta didik lainnya.

c. Kelebihan dan Kelemahan Pembelajaran metode pembelajaran kooperatif teknik *jigsaw*.

1) Kelebihan pembelajaran kooperatif tipe *jigsaw* adalah sebagai berikut:

- a) Peserta didik diajarkan bagaimana bekerjasama dalam kelompok .
- b) Peserta didik yang lemah dapat terbantu dalam menyelesaikan masalah.
- c) Menerapkan bimbingan sesama tema.
- d) Rasa penghargaan pada diri peserta didik lebih tinggi.
- e) Memperbaiki kehadiran.
- f) Penerimaan terhadap perbedaan individu lebih besar.
- g) Sikap apatis berkurang.
- h) Pemahaman materi lebih mendalam.
- i) Meningkatkan motivasi belajar.
- j) Dalam proses belajar mengajar siswa saling ketergantungan positif.
- k) Setiap anggota siswa berhak menjadi ahli dalam kelompok.
- l) Dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerjasama dengankelompok lain.
- m) Setiap siswa saling mengisi satu sama lainArends dalam (Slavin 2008:251).

2) Kekurangan pembelajaran kooperatif tipe *jigsaw* adalah sebagai berikut:

- a) Keadaan kondisi kelas yang ramai,sehingga membuat peserta didik bingung dan pembelajran kooperatif tipe *jigsaw* merupakan pembelajaran baru.
- b) Siswa lemah dimungkinkan menggantungkan pada

peserta didik yang pandai.

c) Jika jumlah anggota kelompok kurang akan menimbulkan masalah, misal 5. jika ada anggota yang hanya membonceng dalam menyelesaikan tugas-tugas dan pasif dalam diskusi.

d) Membutuhkan waktu yang lebih lama apalagi bila ada penataan ruang belum terkoordinir dengan baik, sehingga perlu waktu merubah posisi yang dapat juga menimbulkan gaduh serta butuh waktu dan persiapan yang matang sebelum model pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik Arends dalam (Slavin 2008:251).

d. Langkah-Langkah Metode Pembelajaran Kooperatif *Jigsaw* menurut Aronson (Taniredja 2012:103)

- 1) Siswa dikelompokkan sebanyak 1 sampai dengan 5 orang siswa.
- 2) Tiap orang dalam team diberi bagian materi berbeda-beda.
- 3) Tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang ditugaskan.
- 4) Anggota dari team yang berbeda yang telah mempelajari bagian sub bagian yang sama bertemu dalam kelompok baru (kelompok ahli) untuk mendiskusikan sub bab mereka.
- 5) selesai diskusi sebagai tim ahli tiap anggota kembali kedalam kelompok asli dan bergantian mengajar teman satu tim mereka tentang sub bab yang mereka kuasai dan tiap anggota lainnya mendengarkan dengan seksama.
- 6) Tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi.
- 7) Guru memberi evaluasi.

5. Norma

a. Pengertian Norma

Norma pada hakekatnya merupakan kaedah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Juga dapat diartikan aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku dalam buku siswa(2014:50).

Kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat sangat banyak dan bervariasi. Namun, secara umum norma terdiri dari aturan yang dibuat oleh negara dan aturan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Norma yang dibuat oleh negara berbentuk peraturan tertulis, sedangkan norma yang berkembang dalam masyarakat berbentuk tidak tertulis dalam buku siswa(2014:50).

b. Macam-Macam Norma

1) Norma Kesusilaan

Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang bersumber dari suara hati nurani manusia. Peraturan hidup ini berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Norma kesusilaan ada bersamaan dengan kelahiran atau keberadaan manusia itu sendiri, tanpa melihat jenis kelamin dan suku bangsanya. Suara hati nurani yang dimiliki manusia selalu mengatakan kebenaran dan tidak akan dapat dibohongi oleh siapapun dalam buku siswa(2014:50).

2) Norma Kesopanan

Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan berinteraksi atau bergaul dengan manusia lain dalam masyarakat. Hubungan antarmanusia dalam masyarakat ini membentuk aturan-aturan yang disepakati tentang mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Ada perbuatan yang sopan atau tidak sopan, boleh dilakukan atau tidak dilakukan. Inilah awal mula terbentuk norma kesopanan. Oleh karena norma kesopanan terbentuk atas kesepakatan bersama, maka perbuatan atau peristiwa yang sama memungkinkan terbentuk aturan yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain dalam buku siswa(2014:50).

3) Norma Agama

Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Penganut agama meyakini bahwa apa yang diatur dalam norma agama berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang disampaikan kepada nabi dan rasul-Nya untuk disebarkan kepada seluruh umat manusia di dunia dalam buku siswa(2014:50).

4) Norma Hukum

Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Hukum bersifat memaksa. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim dapat memaksa seseorang untuk menaati hukum dan memberikan hukuman bagi pelanggar hukum. Norma hukum juga mengatur kehidupan lainnya, seperti larangan melakukan tindak kejahatan dan pelanggaran, larangan melakukan korupsi, larangan merusak hutan serta kewajiban memelihara hutan, dan kewajiban membayar pajak. Peraturan tersebut harus dilaksanakan oleh seluruh warga negara Indonesia dalam buku siswa(2014:50).

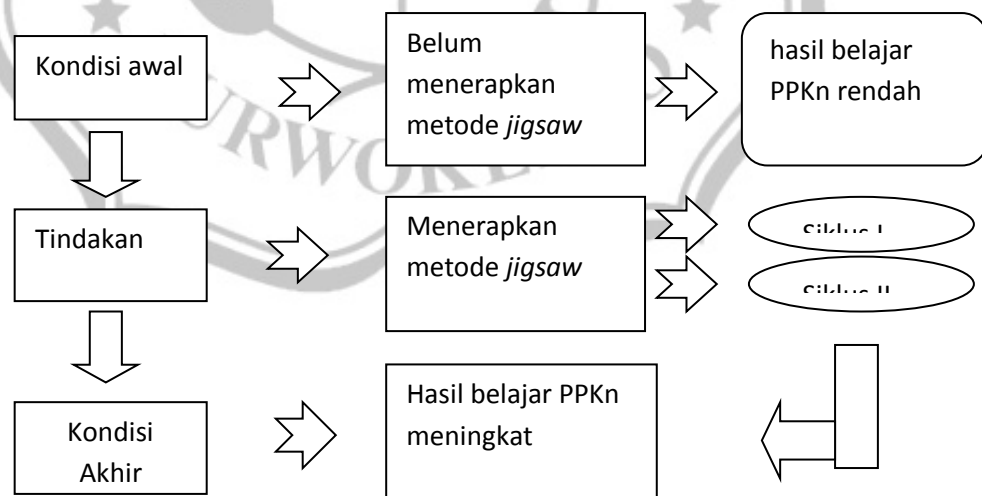
B. Hasil Penelitian Yang Relevan

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Bangun pada bulan Februari Tahun 2010 dengan judul Peningkatan Minat dan Prestasi Belajar IPS Menggunakan metode *Cooperative Learning* dengan teknik *Jigsaw* di Kelas VII A SMP N 1 Patikraja Banyumas yang terdiri dari 2 siklus subjek penelitian terdiri dari 38 peserta didik. Hasil penelitian adalah sebagai berikut Pembelajaran IPS dengan menerapkan metode *Cooperative Learning* teknik *Jigsaw* dapat meningkatkan mutu proses pembelajaran. Hal ini dibuktikan dengan semakin kooperatifnya para siswa dalam pembelajaran IP S sejak siklus 1 hingga siklus

2. Peningkatan minat belajar dibuktikan dengan naiknya ketuntasan belajar secara klasikal, pada siklus 1 sebesar 57,89% menjadi 86,48 % pada siklus 2. Nilai rata-rata prestasi belajar naik yaitu pada siklus 1 sebesar 62,42 menjadi 75,16 pada siklus 2. Siswa kelihatan senang dan berani mengemukakan pendapatnya. Juga dibuktikan dengan hasil pengamatan minat belajar siswa yang semula skor rata siklus 1 sebesar 3,8 hingga mencapai skor rata-rata 4,4 atau kategori baik.

C. Kerangka Pikir

Pada kondisi awal hasil belajar mata pelajaran PPKn materi menumbuhkan kesadaran dan keterikatan terhadap norma yang diperoleh peserta didik masih kurang maksimal dan mutu pembelajaran masih rendah. Selanjutnya pada rencana tindakan siklus I dan II dengan menerapkan metode pembelajaran kooperatif teknik *Jigsaw*, peserta didik akan mengalami peningkatan terhadap hasil pembelajaran.



Gambar 2. 1 Alur Kerangka Berpikir

D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka dapat di rumuskan hipotesis sebagai berikut :

Metode pembelajaran kooperatif teknik *jigsaw* dapat meningkatkan hasil belajar PPKn pada materi menumbuhkan kesadaran dan keterikan pada norma di kelas VII C Semester Gasal SMP N 1 Somagede Tahun pelajaran 2014/2015.

